

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Potensi Sumber Daya Alam**

#### **1. Pesisir Pantai**

Pesisir pantai Kota Probolinggo, Jawa Timur merupakan pesisir yang berbatasan langsung ke Selat Madura. Wilayah Kota Probolinggo secara geografis terletak di sebelah utara Pulau Jawa berbatasan langsung dengan laut yaitu Selat Madura dengan panjang pantai sekitar 7 km yang membentang tambak mulai dari Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan sampai dengan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan dengan luas 164,5 Ha. (BAPPEDA, 2016). Masyarakat Kota Probolinggo dilihat dari sosial budaya sebagian berasal dari budaya agraris (petani dan nelayan). Sedangkan ditinjau dari suku, sebagian besar merupakan Suku Jawa dan Madura yang terkenal ulet, lugas, terbuka, dan kuat dalam kehidupan sosialnya. Selain itu perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong, dan adat budaya khas, serta diwarnai dengan unsur Islam. Hal ini dapat dipandang sebagai potensi masyarakat sehingga menjadi modal dalam peningkatan sumber daya alam maupun manusia.

#### **b. Vegetasi Mangrove**

Mangrove memiliki manfaat besar bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat di wilayah pesisir. Manfaatnya meliputi aspek ekonomi, keamanan dari badai *stunami*, serta ekonomi (laut). Kawasan mangrove, baik langsung maupun tidak langsung memberi kontribusi pada kehidupan jutaan penduduk yang bermukim di sekitar kawasan pesisir. Mangrove merupakan

ekosistem yang dihuni beberapa makhluk hidup selain tanaman mangrove itu sendiri, merupakan rumah dari beberapa biota laut maupun hewan-hewan darat yang memanfaatkan kehidupannya dari laut maupun kawasan mangrove itu sendiri. Ekosistem mangrove memiliki multifungsi yaitu fisik, maupun ekologis, dan sosial ekonomi. Secara fisik mangrove mampu menahan gelombang tinggi, badai, dan pasang sewaktu-waktu sehingga mengurangi nutfah, tempat bertelur dan bersarangnya biota laut. Dari segi sosial ekonomi, mangrove dapat digunakan sebagai daerah tumpangsari dengan memelihara jenis ikan payau yang bernilai ekonomi tinggi atau yang disebut *silvofishery* ataupun dimanfaatkan sebagai obyek daya tarik wisata alam dalam pengembangan ekowisata. (Dian Sulastini dkk, 2011). Jika melihat potensi hutan mangrove di Kota Probolinggo dengan kawasan sepanjang 7 km ditumbuhi oleh mangrove tetapi potensi ini masih belum secara maksimal. Selain itu, kawasan ini juga memiliki luas kurang – lebih 585 hektar (Herrukmi,S.R, [www.balitbangjatim.com](http://www.balitbangjatim.com)) sangatlah tepat untuk dijadikan ekowisata. Keseluruhan luasan total kawasan mangrove yang berada di Kota Probolinggo yakni sebesar 146,5 Ha (DLH, 2010).

### **1. Kondisi Fisik Vegetasi**

Dari hasil survey pendahuluan yang sudah dilakukan oleh Dewan Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, jenis tumbuhan mangrove sangat beragam dan di Kota Probolinggo diperkirakan ada 8 (delapan) spesies/jenis dari tumbuhan ini yang tersebar di pesisir Kota Probolinggo. Adapun jenis dari tumbuhan mangrove ini antara lain :

- 1) *Acanthus illicifolius* L. ( Nama daerah adalah jeruju hitam, daruju, darulu)
- 2) *Avicennia alba* Bl. ( Nama daerah adalah api-api, magi-mangiputih, boak, koak, sia-sia ).
- 3) *Avicennia marina* (Forsk.) Vierh. ( Nama daerah adalah api-api, api-api abang, api-api bungkus, sia-sia putih, sie-sie, pejapi, nyapi, hajusia, pai )
- 4) *Bruguiera gymnorrhiza* (L) Lamk. ( Nama daerah adalah tanjang, tanjang merah, mangi-mangi, lindur, petut, taheup, tenggel, putut, tomo, kandeka, sala-sala, dau, tongke, totongkek, mutut besar, wako, bako, bangko, sarau ).
- 5) *Rhizophora apiculata* Bl ( Nama daerah adalah bakau, bako kurap, slindur, tongke besar, wako, bangko ).
- 6) *Rhizophora mucronata* Lmk ( Nama daerah adalah bakau merah, bakau hitam, bakau korap, bangsa itam, dongoh korap, jangkar, lenggayong, belukap, lolaru ).
- 7) *Sonneratia alba* J.E. Smith ( Nama daerah adalah pedada, perepat, pidada, bogem, bidada, posi-posi, wahat, putih, beropak, bangsa, susup, kedada, muntu, sopo, barapak, pupat, mange-mange ).
- 8) *Derris trifoliata* Lour ( Nama daerah adalah kambingan, ambung, tuba laut, areuy, ki tonggeret, tuwa areuy, gade toweran, kamulut, dan tuba abal (merupakan mangrove ikutan)).

Pada saat ini kawasan hutan mangrove yang terdapat di Desa Pilang yakni sebesar 15 Ha dan Desa Mayangan sebesar 12,3 Ha dan untuk kerapatan tanaman

mewakili komunitas tanaman mangrove yang berada pada kawasan tersebut yang berada di Desa Pilang, disajikan pada tabel

Tabel. 1 Kerapatan Tanaman Mangrove di Desa Pilang

No	Sampel	Kriteria	Jumlah Vegetasi / 100 m <sup>2</sup>	Kerapatan Jenis (Di)
1	I	Jarang	22 Tanaman	0,22
2	II	Sedang	30 Tanaman	0,30
3	III	Rapat	41 Tanaman	0,41

Sumber : *Olah data, 2017*

Tabel. 2 Kerapatan Tanaman Mangrove di Desa Mayangan

No	Sampel	Kriteria	Jumlah Vegetasi / 100 m <sup>2</sup>	Kerapatan Jenis (Di)
1	I	Jarang	10 Tanaman	0,10
2	II	Sedang	16 Tanaman	0,16
3	III	Rapat	25 Tanaman	0,25

Sumber : *Olah data, 2017*

Kerapatan dilakukan dengan menganalisis tiga kriteria yang berada pada 3 kawasan berbeda yang berada di Desa Pilang, Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo dan Desa Mayangan, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

### 1.1. Vegetasi Mangrove Desa Pilang

Desa Pilang, sampel pertama berada yang ditunjukkan GPS di titik garis lintang 7°44'30.52"S dan garis bujur 113°11'48.42"T memiliki kerapatan kategori jarang yang berjumlah 22 vegetasi tanaman mangrove. Tanaman mangrove yang memiliki diameter besar berjumlah 5 tanaman (25-30 cm), untuk mangrove yang memiliki diameter sedang berjumlah 6 tanaman (15-20 cm), dan diameter kecil berjumlah 15 tanaman (12-15 cm). Jenis tumbuhan mangrove yang dominan tumbuh pada sampel satu adalah jenis *Rhizophora.Sp* dan memiliki akar tongkat. Pada sampel ke-2 yang ditunjukkan pada GPS berada pada 7°44'27.57"S Garis

Bujur dan  $113^{\circ}11'24.94''$ T Garis Lintang. Tanaman yang dianalisis berjumlah 30 tanaman dengan kerapatan 0,30. Diameter tanaman kategori besar berjumlah 2 tanaman (30-25 cm), diameter sedang berjumlah 9 tanaman (20-25 cm), dan diameter kecil berjumlah 10 (10-15 cm). Jenis mangrove yang dominan yakni jenis mangrove *Rhizophora.Sp* dengan akar tongkat.



(a)



(b)

Gambar 1. (a) Jenis tanaman mangrove *Rhizophora . Sp* pada sampel 2 (b) Jenis akar tongkat mangrove *Rhizophora . Sp* pada sampel 2

Pada sampel ke-3 pada GPS ditunjukkan  $7^{\circ}44'27.57''$ S Garis Lintang dan  $113^{\circ}11'24.94''$ T Garis Bujur. Jumlah tanaman mangrove di sampel ke-3 berjumlah 41 tanaman dengan kerapatan 0,41. Diameter besar berjumlah 3 tanaman (30-25 cm), sedang berjumlah 12 tanaman (20-22 cm), dan berukuran kecil (15-17 cm). Tanaman mangrove di dominasi jenis *Rhizophora.Sp*, seperti gambar 5. berikut :



Gambar 2. (a) Jenis tanaman mangrove *Rhizophora . Sp* pada sampel 3 (b) Jenis akar tongkat mangrove *Rhizophora . Sp* pada sampel 3

## 1.2. Vegetasi Mangrove Desa Mayangan

Desa Mayangan, sampel pertama berada yang ditunjukkan GPS di titik garis lintang  $7^{\circ}44'12.42''$  S dan garis bujur  $113^{\circ}12'44.74''$  T memiliki kerapatan kategori jarang yang berjumlah 10 vegetasi tanaman mangrove dengan kerapatan 0,10. Tanaman mangrove yang memiliki diameter besar berjumlah 2 tanaman (20-25 cm), untuk mangrove yang memiliki diameter sedang berjumlah 3 tanaman (15-20 cm), dan diameter kecil berjumlah 5 tanaman (10-15 cm). Jenis tumbuhan mangrove yang dominan tumbuh pada sampel satu adalah jenis *Rhizophora.Sp* dan memiliki akar tongkat.

Pada sampel ke-2 yang ditunjukkan pada GPS berada pada  $7^{\circ}44'17.01''$  S Garis Bujur dan  $113^{\circ}12'35.53''$  T Garis Lintang. Tanaman yang dianalisis berjumlah 16 tanaman dengan kerapatan 0,16. Diameter tanaman kategori besar berjumlah 2 tanaman (30-25 cm), diameter sedang berjumlah 7 tanaman (20-25 cm), dan diameter kecil berjumlah 7 (10-15 cm). Jenis mangrove yang dominan yakni jenis mangrove *Rhizophora.Sp* dengan akar tongkat. Seperti di gambar 6. berikut :



(a)



(b)

Gambar. 3 (a) Jenis tanaman mangrove *Rhizophora . Sp* pada sampel 2 (b) Jenis akar tongkat mangrove *Rhizophora . Sp* pada sampel 2

Pada sampel ke-3 pada GPS ditunjukkan  $7^{\circ}44'13.45''S$  Garis Lintang dan  $113^{\circ}12'41.49''T$  Garis Bujur. Jumlah tanaman mangrove di sampel ke-3 berjumlah 25 tanaman dengan kerapatan 0,25. Diameter besar berjumlah 3 tanaman (30-25 cm), sedang berjumlah 9 tanaman (19-22 cm), dan berukuran kecil 13 (10-17 cm). Tanaman mangrove di dominasi jenis *Rhizophora.Sp*, seperti gambar 7 .berikut :



(a)

(b)

Gambar. 4 (a) Jenis tanaman mangrove *Rhizophora. Sp* pada sampel 3 (b) Jenis akar tongkat mangrove *Rhizophora. Sp* pada sampel 3

### c. Fauna Ekosistem Mangrove

Hutan Mangrove merupakan habitat dari berbagai jenis satwa liar dengan keanekaragaman yang tinggi. Salah satunya yakni para fauna yang memdiami kawasan hutan Mangrove sebagai pusat kebutuhan hidup mereka juga. Fauna Ekosistem Mengrove merupakan pencampuran kelompok fauna daratan dan perairan. Kelompok fauna daratan atau *terrestrial* yang umumnya menempati bagian atas Mangrove terdiri atas : insekta, ular, primata, dan burung. Kelompok ini tidak mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan Mangrove, karena mereka melewatkan sebagian besar hidupnya di luar jangkauan laut pada bagian pohon yang tinggi, meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa hewan laut pada saat air surut. Kelompok fauna perairan atau akuatik, terdiri atas dua tipe. Tipe pertama dalaman yang hidup di kolom air, terutama berbagai jenis ikan dan udang; dan yang menempati *substrat* baik keras atau akar dan batang pohon Mangrove, maupun lunak atau lumpur terutama kepiting, kerang dan berbagai invertebrata lainnya (Nybakken, 1998; Tomasick *et al*, 1997). Di lapangan yakni di Desa Pilang dan Mayangan banyak ditemukan fauna di dalam ekosistem Mangrove namun, banyak didominasi oleh kepiting bertangan satu atau disebut kepiting biola (*Uca spp.*), kerang tiram (*Crassostrea cuculata*) dan ikan tembakul (*Periophthalmus modestus*) atau masyarakat lokal menyebutnya dengan nama ikan lunjat. Fauna *terrestrial* atau daratan yang menempati Hutan mangrove yakni didominasi oleh burung kuntul putih (*E. Alba*) dan salah satunya yakni kucing bakau (*Felis viverrina*).



#### d. Kesesuaian Perairan ( pH air dan Salinitas )

Kesesuaian perairan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan budidaya mangrove, yang meliputi salah satunya yakni pH dan salinitas kawasan. Berikut merupakan kaar pH dan salinitas yang berada di lapangan, disajikan pada tabel 9

Tabel. 3 Tingkat Salinitas di Desa Mayangan dan Desa Pilang

No	Nama Desa	Sampel	pH	Salinitas (ppt)
1	Desa Mayangan	1	7,27	2,79
		2	7,26	2,95
		3	7,29	2,24
		Rerata	7,3	2,7
2	Desa Pilang	1	7,25	2,02
		2	7,32	2,08
		3	7,27	2,02
		Rerata	7,3	2,0

Sumber : Olah Data, 2017

Pada tabel. 9 merupakan kadar pH dan salinitas di kedua desa objek yakni desa Mayangan dan desa Pilang. Pada kedua desa tersebut didapatkan kadar pH dan salinitas yang berbeda-beda. Kadar pH di desa Mayangan antara 7,26 – 7,29, di desa pilang memiliki kadar pH antara 7,25 – 7,32. Didapatkan rata – rata pH pada kedua desa tersebut sebesar 7,3. Hal ini dapat dikatakan pH yang didapatkan pada kedua desa tersebut dikatakan memiliki perairan yang produktif, hal ini sesuai dengan pernyataan (Wardoyo, 1974) bahwa perairan dengan pH 6,5-7,5 termasuk perairan yang produktif dan juga menunjukkan bahwa lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan mangrove menurut Wijayanti (2007) yang mengemukakan bahwa kisaran pH air antara 6-8,5, sangat cocok untuk pertumbuhan mangrove. Kadar salinitas merupakan faktor oseanografi yang mudah diukur, tetapi sangat

berperan penting dalam proses fisika, kimia, biologi di laut, seperti dalam proses pencampuran, konsentrasi oksigen, terlarut dan penyebaran organisme laut ( Knauss, 1977 ; Lavestu dan Hayes, 1982 ). Kadar salinitas yang dilakukan di laboratorium menunjukkan kadar salinitas pada desa Mayangan dan desa Pilang yang didapatkan yakni pada desa Mayangan kadar salinitasnya antara 2,24 – 2,95 ppt, sedangkan di desa Pilang kadar salinitasnya antara 2,02 – 2,08 ppt. Salinitas merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Salinitas kawasan mangrove sangat bervariasi, berkisar 0,5 – 35 ppt, karena adanya masukan air laut pada saat pasang dan air tawar dari sungai. Pada kadar salinitas tertinggi pada kedua desa, didapatkan pada titik yang berbatas langsung dengan titik temu rawa dengan air laut dan yang terendah merupakan titik sampel yang tidak berbatasan langsung atau agak jauh dari titik temu air laut dengan rawa. Salinitas yang tinggi pada dasarnya bukan prasyarat untuk tumbuhnya mangrove, terbukti beberapa spesies mangrove dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan air tawar.

#### **e. Persepsi Masyarakat dan Pemerintah**

##### **1. Persepsi Masyarakat**

Persepsi masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam penelitian yang dilakukan dalam perencanaan. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam memberikan saran, masukan terhadap penelitian demi keberhasilan tatanan dan rencana kawasan. Persepsi masyarakat disajikan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan dengan wawancara langsung yang telah dibuat dalam bentuk kuisioner. Hasil kuisioner dianalisis dengan menggunakan presentase (%) untuk diambil

jumlah persentase yang paling besar untuk mencari nilai atau skor terbesar jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan metode deskriptif. Responden merupakan penduduk asli Desa Pilang yakni dengan jumlah responden 16 orang.

a. Hutan Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan salah satu potensi kawasan di Desa Pilang dan Desa Mayangan yang dijadikan sebagai objek pariwisata kawasan ekowisata berbasis masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi hutan mangrove yang ada merupakan poin penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove guna mendukung kelayakan kawasan dalam pengembangan wisata berbasis ekowisata. Tingkat pengetahuan masyarakat dapat diukur dengan memberikan pertanyaan pada responden yang mewakili masyarakat kemudian dibuat persentase seperti tabel 10.

Tabel 4. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Pilang tentang mangrove yang berada pada objek wilayah

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Awal mulanya adanya mangrove	Upaya penanaman dari masyarakat	16	100
		Program Pemerintah	0	0
		Tumbuh Alami	0	0
2	Kondisi ekosistem mangrove saat ini	Sangat Terjaga	15	93,75
		Terjaga	1	6,25
		Tidak Terjaga	0	0
3	Pentingnya mangrove di pantai	Sangat Penting	16	100
		Penting	0	0
		Biasa Saja	0	0
		Tidak Penting	0	0
4	Pengetahuan peranan dan fungsi mangrove	Ya	16	100
		Tidak	0	0
5	Peran dan fungsi mangrove yang diketahui	Melindungi pantai dari erosi	16	100
		Melindungi pemukiman penduduk dari terpaan badai dan angin dari laut	0	0
		Mencegah intruisi laut	0	0
		Wilayah penyangga	0	0

Sumber : Olah data, 2017

Pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa 100% persepsi masyarakat tumbuhan mangrove yang berada di pesisir pantai Desa Pilang upaya penanaman dari masyarakat sendiri dan opsi yang yang lain menunjukkan 0%. Persepsi masyarakat tentang kondisi mangrove saat ini menunjukkan 93,75 % sangat terjaga, 6,25 % menunjukkan bahwa kondisi mangrove terjaga, dan opsi lainnya menunjukkan 0%. Persepsi masyarakat tentang pentingnya mangrove dipantai menunjukkan 100% berpersepsi sangat penting dan opsi lainnya menunjukkan 0%.

Persepsi masyarakat tentang pengetahuan peranan dan fungsi mangrove menunjukkan 100% mengetahui peranan dan fungsi mangrove (Ya) dan opsi lainnya menunjukkan 0%. Persepsi masyarakat tentang peran dan fungsi mangrove yang diketahui oleh masyarakat menunjukkan 100% untuk melindungi pantai dari erosi, dan opsi lainnya menunjukkan 0%. Artinya masyarakat di Desa Pilang sangat mengerti tentang peran dan fungsi mangrove yang berada di pantai Desa Pilang. Hal ini dimulai dari salah satu penduduk asli Desa Pilang bernama Bapak Muchlis yang melihat bahwa mangrove merupakan peranan penting di Desa Pilang. Kegiatan beliau ini yang menjadi cikal bakal dan menyadarkan bahwa peranan dan fungsi penting mangrove di Desa Pilang dan menggerakkan masyarakat setempat dalam kegiatan konservasi. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Probolinggo melihat Bapak Muchlis sebagai pelopor Lingkungan di Kota Probolinggo dan menyadarkan khususnya di Desa Pilang tidak buta terhadap lingkungan khususnya mangrove. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik terhadap perencanaan maupun tahap-tahap perencanaan dan penilaian.

Selanjutnya yakni persepsi masyarakat mayangan tentang pengetahuan masyarakat akan adanya hutan mangrove di Desa Mayangan ditunjukkan pada tabel 11.

Tabel 5. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Mayangan tentang mangrove yang berada pada objek wilayah

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Awal mulanya adanya mangrove	Upaya penanaman dari masyarakat	3	17
		Program Pemerintah	11	56
		Tumbuh Alami	5	28
2	Kondisi ekosistem mangrove saat ini	Sangat Terjaga	7	39
		Terjaga	7	39
		Tidak Terjaga	4	22
3	Pentingnya mangrove di pantai	Sangat Penting	10	56
		Penting	8	44
		Biasa Saja	0	
		Tidak Penting	0	
4	Pengetahuan peranan dan fungsi mangrove	Ya	15	83
		Tidak	3	17
5	Peran dan fungsi mangrove yang diketahui	Melindungi pantai dari erosi	13	72
		Melindungi pemukiman penduduk dari terpaan badai dan angin dari laut	5	28
		Mencegah intruksi air laut	0	
		Wilayah penyangga	0	

Sumber : Olah data, 2017

Tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat pada desa Pilang, desa Mayangan memiliki pendapat yang hampir sama dengan dengan desa Pilang yang membedakan yakni pada point pertama upaya awal mulanya adanya mangrove menunjukkan 17 % upaya penanaman dari masyarakat, 56 % merupakan program dari pemerintah dan 28 % merupakan tumbuh alami. Pada poin selanjutnya yakni kondisi ekosistem mangrove pada saat ini menunjukkan 39 % memilih sangat

terjaga, 39 % terjaga dan 22 % memilih tidak terjaga. Poin selanjutnya yakni persepsi masyarakat tentang pentingnya peranan dan fungsi mangrove di Desa Mayangan menunjukkan 56 % memilih sangat penting dan 44 % memilih penting saja. Pada poin selanjutnya persepsi masyarakat tentang pengetahuan peranan dan fungsi mangrove di Desa Maayangan menunjukkan 83 % milih Ya dan 17 % memilih tidak. Poin yang terakhir yakni peran dan fungsi mangrove yang diketahui oleh masyarakat Desa Mayangan menunjukkan 72 % memilih melindungi pantai dari erosi dan melindungi pemukiman penduduk dari terpaan badai dan angin dari laut. Dapat lihat persepsi masyarakat Desa Mayangan dan Desa Pilang tidak jauh berbeda, namun yang yang berbeda yakni pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang awal mula adanya hutan mangrove di desa Mayangan yakni menunjukkan terbesar yakni 56 % adalah program dari pemerintah hal ini menunjukkan bahwa kawasan mangrove di Desa Mayangan merupakan program pemerintah Kota Probolinggo untuk membentuk ekosistem mangrove sebagai penghalang air laut, dikarenakan desa Mayangan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan pelabuhan.

#### b. Ekowisata

Ekowisata merupakan upaya pengembangan dan pelestarian kawasan mangrove yang ada di kawasan desa Pilang dengan memanfaatkan potensi yang di kawasan tersebut. Peran masyarakat sangat berperan penting terhadap pengembangan dan perencanaan ekowisata yang dilakukan layak tidaknya untuk dilakukan pengembangan dan perencanaan ekowisata di kawasan tersebut. Desa Pilang dan Mayangan berperan sebagai penentu obyek memiliki daya tarik atau

tidak kawasan. Pengetahuan tentang ekowisata menjadi acuan dalam pengembangan ekowisata dan menentukan zonasi kawasan wisata di pesisir pantai Desa Pilang dapat di lihat pada Tabel 12

Tabel. 6 Pengetahuan masyarakat Desa Pilang tentang ekowisata

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Apakah masyarakat mengetahui Ekowisata	Ya	10	62,5
		Tidak	6	37,5
2	Pengetahuan masyarakat tentang ekowisata	Taman Nasional	3	18,75
		Wisata Alam	13	81,25
		Wisata Hutan	0	0
		Raya		

Sumber : Olah Data, 2017

Pada tabel 12 persepsi masyarakat di atas menunjukkan bahwa 62,5% masyarakat mengetahui tentang ekowisata dan 37,5% masyarakat tidak mengetahui ekowisata. Persepsi masyarakat tentang tingkat pengetahuan masyarakat tentang ekowisata menunjukkan 81,25% berbentuk Wisata alam, 18,75% Taman Nasional, dan 0% untuk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang ekowisata sangat baik. Pengetahuan masyarakat tentang ekowisata sangatlah penting untuk daerah pengembangan dan perencanaan kawasan yang nantinya akan dikembangkan ekowisata, terutama masyarakat sekitar yang berada pada kawasan pengembangan ekowisata tersebut. Hal ini, karena masyarakat berperan aktif dalam pengembangan maupun perencanaan ekowisata tersebut guna berkelanjutan kawasan ekowisata tersebut.



Tabel. 7 Tingkat pengetahuan masyarakat tentang mangrove yang berada pada objek wilayah

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Apakah masyarakat mengetahui Ekowisata	Ya	11	61
		Tidak	7	39
2	Pengetahuan masyarakat tentang Ekowisata	Taman Nasional	5	28
		Wisata Alam	13	72
		Wisata Hutan Raya	0	0

Sumber : Olah data, 2017

Pada tabel. 13 merupakan data tabel persepsi masyarakat Mayangan, dapat dilihat dari tabel menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat dimulai dari pengetahuan masyarakat tentang apakah masyarakat mengetahui apa itu ekowisata menunjukkan 61 % menunjukkan Ya dan 39 % tidak dan diperkuat dengan persepsi masyarakat tentang pengetahuan tentang ekowisata menunjukkan 72 % ekowisata merupakan wisata alam. Kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal (Hakim, 2004).

Selanjutnya pada tabel 14. merupakan persepsi masyarakat terhadap daya dukung masyarakat terhadap pengembangan kawasan pesisir dan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata berbasis masyarakat. Pada tabel 14. bahwa persepsi masyarakat tentang daya dukung masyarakat tentang pengembangan kawasan ekowisata mangrove berbasis masyarakat menunjukkan 43,75 % terdapat pengembangan kawasan yang dilakukan masyarakat dan 56,25 % berpersepsi bahwa tidak ada pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat hal ini dikarenakan bahwa masyarakat sangat mengerti bahwa masyarakat tidak punya

wewenang untuk mengolah kawasan mangrove jika tidak ada wadah yang menaungi mereka dikarenakan lagi hal yang bisa timbul adalah kegiatan yang dilakukan jika dilakukan oleh perseorangan atau kelompok maka timbul persepsi bahwa kegiatan tersebut adalah perusakan dan satu hal lagi kegiatan pengembangan tersebut harus disertai izin dari yang terkait.

Tabel. 8 Persepsi masyarakat Desa Pilang terhadap daya dukung masyarakat terhadap pengembangan kawasan pesisir dan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata berbasis masyarakat

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan tersebut	Ya	7	43,75
		Tidak	9	56,25
2	Kawasan pantai area hutan mangrove di Desa Pilang dikembangkan menjadi ekowisata berbasis masyarakat	Setuju	16	100
		Tidak Setuju	0	0
3	Dukungan dari masyarakat apabila Kawasan pantai area hutan mangrove di Desa Pilang menjadi ekowisata berbasis masyarakat	Mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaannya	16	100
		Mendukung, tetapi tidak ikut dalam pengelolaannya	0	0
		Tidak mendukung karena kurang potensial	0	0
4	Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan	Dinas Pariwisata	1	6,25
		Pemerintah Desa	0	0
		Masyarakat Sekitar	0	0
		Lainnya	15	93,75

Sumber : Olah Data, 2017.

Pada **UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN** pada pasal 50 (b) bab 2 dinyatakan sebagai berikut “*Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan*” . Selanjutnya yakni persepsi masyarakat tentang kawasan pesisir dan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata berbasis masyarakat mendapat 100 % yang berpersepsi setuju dan 0 % untuk opsi lainnya. Disini masyarakat sangat ingin kawasan pesisir dan hutan mangrove untuk dijadikan sebuah ekowisata yang dapat menyejahterakan kawasan tersebut namun, masyarakat tidak ada wadah dapat mewakili suara mereka karena sangat takut terhadap UU yang berlaku terhadap kawasan tersebut. Selanjutnya yakni persepsi masyarakat terhadap dukungan dari masyarakat apabila desa Pilang dikembangkan menjadi ekowisata berbasis masyarakat menjawab 100 % mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaannya. Hal ini diperkuat oleh *Sumodingrat, (1988)* bahwa partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan dan bahwa parasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan. Persepsi masyarakat selanjutnya yakni pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan tersebut 6,25 % menjawab adalah Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa 0 %, Masyarakat sekitar 0 % dan

lainnya sebesar 93,75 %, disini pada opsi lainnya masyarakat berpersepsi yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Mungkin dikarenakan bahwa pengetahuan masyarakat bahwa LSM merupakan wadah aspirasi masyarakat. Menurut Nasrudin, (2017) LSM salah satunya berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah dan senantiasa ikut menumbuhkan kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini seharusnya semua pihak pemerintah maupun masyarakat harus berkerja sama demi mewujudkan pembangunan dan perencanaan yang saling mengisi, Menurut Syukur dkk., 2007 bahwa pengelolaan hutan mangrove terdapat 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan yaitu : (1) Potensi sumberdaya hutan mangrove. (2) Masyarakat disekitar hutan mangrove dan (3) Aparatur pemerintah. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang dinamis. Sehingga dalam kebijakan pengelolaan mangrove melalui pelibatan masyarakat lebih proaktif kearah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan melestarikan apa yang telah dikembangkan dalam ekowisata. Idealnya posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program. Masyarakat tersebutlah yang harus berperan aktif dalam upaya pengelolaan hutan mangrove tersebut. Masyarakat sebagai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi keberhasilan dan pe-manfaatannya secara berkelanjutan semua-nya dipercayakan kepada masya-rakat, sedangkan

pemerintah hanyalah sebagai penyedia dana, pengontrol, dan fasilitator berbagai kegiatan yang terkait.

Tabel. 9 Persepsi masyarakat Desa Mayangan terhadap daya dukung masyarakat terhadap pengembangan kawasan pesisir dan hutan mangrove untuk dijadikan kawasan ekowisata berbasis masyarakat

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan tersebut	Ya	7	38.9
		Tidak	11	61.1
2	Kawasan pantai area hutan mangrove di Desa Pilang dikembangkan di Desa Pilang dikembangkan menjadi ekowisata berbasis masyarakat	Setuju	13	72.2
		Tidak Setuju	5	27.8
3	Dukungan dari masyarakat apabila kawasan pantai area hutan mangrove di Desa Pilang dikembangkan menjadi ekowisata berbasis masyarakat	Mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaanya	11	61.1
		Mendukung, tetapi tidak ikut dalam pengelolaanya	0	0
		Tidak mendukung karena kurang potensial	0	0
4	Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan	Dinas Pariwisata	5	27.8
		Pemerintah Desa	4	22.2
		Masyarakat Sekitar	7	38.9
		Lainnya	2	11.1

Sumber : Olah data, 2017

Pada data tabel 15 persepsi masyarakat Mayangan diatas tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat Desa Pilang yang membedakan yakni pada poin pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan kawasan yakni menunjukkan 38,9

% yakni masyarakat sekitar, hal ini masyarakat Mayangan memiliki pengetahuan bahwa yang bertanggung jawab akan daerahnya adalah masyarakat sekitar, karena yang bertugas dilapangan dan berinteraksi langsung dengan lingkungan adalah masyarakat dan pemerintah hanya bertanggung jawab salah satunya yakni pendana dan pengawas. Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain (1980, h. 119 dikutip dari Ndraha, 1990), bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah tengah masyarakat, partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat serta dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengembangan objek ekowisata ditentukan berdasarkan potensi dan persepsi masyarakat sebagai pelaku pengelola wisata. Berikut merupakan persepsi masyarakat tentang objek wisata yang dikembangkan dan sarana prasaran penunjang wisata kawasan ekowisata. Persepsi masyarakat pada tabel 17. menunjukkan objek wisata yang cocok untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan hutan mangrove menunjukkan 12,5 % memilih wisata pantai, 87,5 % untuk wisata mangrove, dan 0 % untuk opsi lainnya. Hal ini dikarenakan letak geografis kawasan yang berada di kawasan pesisir dan kawasan mangrove. Masyarakat melihat keinginan ini dengan melihat potensi yang ada pada kawasannya yang dihuni dan lebih cenderung memilih wisata pesisir dan wisata mangrove daripada wisata yang lainnya.

Tabel 10. Persepsi masyarakat Desa Pilang tentang objek wisata yang dikembangkan dan sarana prasarana penunjang wisata kawasan ekowisata

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Objek wisata yang cocok untuk dikembangkan	Wisata Pantai	2	12,5
		Wisata Mangrove	14	87,5
		Taman Bermain	0	0
		Kawasan Pertanian	0	0
		Lainnya	0	0
2	Sarana dan prasarana yang perlu disediakan	Pengadaan sarana pendukung wisata (kamar kecil, musholla, pusat informasi)	14	87,5
		Pengadaan area bermain anak-anak	5	31,25
		Pengadaan tempat santai / istirahat pengunjung	10	62,5
		Rumah makan / oleh oleh hasil laut maupun mangrove	11	68,75
		Perbaikan jalan dan pengadaan lahan parkir	13	81,25
		Lainnya	0	0

Sumber : Olah Data, 2017

Perlu adanya pertimbangan apa saja yang diinginkan masyarakat dalam rencana pengembangan kawasan pesisir dan hutan mangrove dengan mengambil persepsi akan poin tersebut dengan melihat potensi dan persepsi masyarakat yang berperan sebagai pengelola.

Pada tabel 17. dapat dilihat persepsi masyarakat tentang sarana dan prasarana yang diinginkan masyarakat, karena sarana dan prasarana merupakan penunjang utama untuk objek ekowisata yang diinginkan. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah fasilitas yang ditawarkan untuk menunjang suatu tujuan bersama yakni dari masyarakat untuk masyarakat, seperti akses jalan, transportasi,

bangunan-bangunan pendidikan, dll. Persepsi masyarakat pada tabel... menunjukkan 87,5 % menginginkan adanya sarana pendukung wisata seperti kamar kecil, musholla, dan pusat informasi, 31,25 % menginginkan pengadaan sarana untuk bermain anak-anak, 62,5 % menginginkan pengadaan tempat santai / istirahat, 68,75 % menginginkan adanya rumah makan atau hasil laut maupun mangrove, dan 81,25% menginginkan perbaikan jalan dan pengadaan lahan parkir. Dari data persepsi masyarakat untuk sarana dan prasarana yang didapat menunjukkan bahwa untuk skala prioritas masyarakat menginginkan adanya sarana pendukung wisata seperti kamar kecil, musholla, dan pusat informasi, hal ini dikarenakan masyarakat ingin memberikan wisata yang menciptakan kesan nyaman bagi pengunjung yang datang, dan masyarakat sekitar berharap itu sebagai kepuasan dan kelayakan bagi konsumen dan meningkatkan daya kunjung wisata ke kawasan tersebut. Selanjutnya, yakni adanya perbaikan jalan dan pengadaan lahan parkir, persepsi masyarakat menginginkan adanya perbaikan jalan, mungkin sudah ada akses jalan menuju lokasi kawasan, tapi jalan utama masih tergolong sempit jika dimasuki untuk transportasi kategori mobil atau *elf*, di lapangan keterbatasannya lahan parkir yang ada dan masyarakat menginginkan adanya pembukaan lahan parkir yang baru untuk menunjang wisatawan yang berkunjung. Akses jalan yang mudah dijangkau merupakan poin penting untuk kemajuan sebuah wisata.



Tabel. 11 Persepsi masyarakat Desa Mayangan tentang objek wisata yang dikembangkan dan sarana prasarana penunjang wisata kawasan ekowisata

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Objek wisata yang cocok untuk dikembangkan	Wisata Pantai	10	55,6
		Wisata Mangrove	8	44,4
		Taman Bermain	0	0
		Kawasan Pertanian	0	0
		Lainnya	0	0
2	Sarana dan prasarana yang perlu disediakan	Pengadaan sarana pendukung wisata (kamar kecil, musholla, pusat informasi)	14	77,8
		Pengadaan area bermain anak-anak	5	27,8
		Pengadaan tempat santai / istirahat pengunjung	10	55,6
		Rumah makan / oleh oleh hasil laut maupun mangrove	11	61,1
		Perbaikan jalan dan pengadaan lahan parkir	14	77,8
		Lainnya	0	0

Sumber : Olah data, 2017

Pada tabel 17. diatas merupakan persepsi masyarakat Mayangan objek wisata dan sarana prasarana yang akan dikembangkan menunjukkan 55,6 % wisata pantai dan 44,4 % untuk wisata mangrove. Masyarakat Mayangan menginginkan adanya wisata bernuansa pantai karena desa Mayangan berbatasan langsung dengan kawasan pesisir untuk nelayan mencari ikan dan kawasan pelabuhan. Selanjutnya pada point sarana prasarana responden bisa memilih jawaban atau pilihan lebih dari satu. Masyarakat Mayangan menunjukkan 77,8 % pengadaan sarana pendukung wisata, 27,8 % pengadaan sarana bermain anak, 55,6 % pengadaan tempat istirahat, 61,1 % pengadaan rumah makan/tempat oleh-oleh hasil laut, dan 77,8 % perbaikan jalan

/ pengadaan lahan parkir. Hal yang paling utama dari pengembangan kawasan khususnya pada sektor ekowisata yakni adanya akses yang memudahkan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan wisata dan terlebih lagi jika sudah ada akses untuk menuju ke kawasan wisata tersebut dilakukan peninjauan kondisi akses yang sudah ada dan tidak dikatakan layak perlu dilakukan perbaikan menuju akses ke kawasan tersebut.

Pengembangan sebuah wisata yang berbasis masyarakat semata-mata adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada sebuah kawasan tersebut dengan melihat potensi-potensi yang ada pada kawasan tersebut. Pengembangan dan perencanaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan harapan baru bagi kesejahteraan dan membantu kemajuan ekonomi bagi daerah maupun masyarakat yang berada pada kawasan perencanaan dan pengembangan wisata atau skala lokal. Persepsi masyarakat tentang manfaat dan harapan apa saja yang dapat hadir jika pengembangan wisata tersebut ada. Pada tabel 19. didapatkan bahwa persepsi masyarakat tentang manfaat yang didapatkan jika ada pengembangan ekowisata mangrove berbasis masyarakat yakni terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sebesar 100 % dan meningkatnya daya tarik masyarakat kawasan pesisir dan mangrove sebesar 100 % masyarakat menginginkan adanya pengurangan tingkat pengangguran yang ada pada kawasan yang diadakan pengembangan dan perencanaan ekowisata.

Tabel. 12 Persepsi masyarakat Desa Pilang tentang manfaat dan harapan jika ekowisata terwujud

No	Komponen	Pendapat	Presentase (%)
1	Manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan berbasis masyarakat di kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar	100
		Meningkatkan daya tarik pesisir pantai utara dan mangrove	0
		Tidak ada manfaat	0
2	Harapan masyarakat mengenai pengembangan kawasan pesisir pantai area hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat	Lainya	0
		Memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat	87,5
		Meningkatkan perekonomian masyarakat	75
		Dapat mengangkat potensi daerah	62,5
		Menjadi daerah tujuan wisata baru di Kota Probolinggo	31,25

Sumber : Olah data, 2017

Persepsi masyarakat tentang harapan masyarakat mengenai pengembangan kawasan pesisir pantai area mangrove sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat menunjukkan 87,5 % masyarakat berpersepsi dapat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, 75 % dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, 62,5 % berpersepsi dapat mengangkat potensi daerah dan 31,25 % dapat menjadi tujuan wisata baru di Kota Probolinggo. Ekowisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, dan

mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan ekowisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos transportasi; homestay; menjual kerajinan, dll. Ekowisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan ekowisata.

Tabel 13. Persepsi masyarakat Desa Mayangan tentang manfaat dan harapan jika ekowisata terwujud

No	Komponen	Pendapat	Presentase (%)
1	Manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan berbasis masyarakat di kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar	83,3
		Meningkatkan daya tarik pesisir pantai utara dan mangrove	56
		Tidak ada manfaat	0
		Lainya	44,4
2	Harapan masyarakat mengenai pengembangan kawasan pesisir pantai area hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat	Memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat	100
		Meningkatkan perekonomian masyarakat	61,1
		Dapat mengangkat potensi daerah	72,2
		Menjadi daerah tujuan wisata baru di Kota Probolinggo	28

Sumber : Olah data, 2017

Pada tabel 20. diatas didapatkan persepsi masyarakat tentang manfaat dan harapan adanya ekowisata mangrove menunjukkan manfaat akan adanya ekowisata

mangrove berbasis masyarakat 83,3 % membuka lapangan kerja baru, 56 % meningkatkan daya tarik kawasan pesisir pantai dan mangrove dan 44,4 % lainnya. Harapan masyarakat mengenai pengembangan kawasan pesisir sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat menunjukkan 100 % memberikan lapangan kerja baru, 61,1 % meningkatkan perekonomian masyarakat, 72,2 % dapat mengangkat potensi daerah dan 28 % menjadi tujuan wisata baru di Kota Probolinggo. Sesuai dengan konsep pembangunan kepariwisataan berdasarkan pada pengembangan masyarakat lokal (*community based tourism*), maka pengembangan kegiatan pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta diarahkan agar dapat mengakomodasikan upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan pada konsep tersebut, maka pengembangan kegiatan pariwisata diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal (Siswanto, 2003).

## **2. Persepsi Pemerintah**

Pemerintah bertugas sebagai pemangku kepentingan pada sebuah daerah dan menetapkan kebijakan – kebijakan pada daerah tersebut. Pada penelitian ini pemerintah memiliki peran penting dan wewenang dalam mendukung, memutuskan, dan memberi izin dalam melakukan perencanaan pada objek penelitian yang dilakukan. Pemerintah diberikan jejak pendapat tentang adanya perencanaan ekowisata mangrove di Desa Mayangan dan Desa Pilang. Jejak pendapat atau pemberian kuisioner dilakukan guna mengetahui daya dukung pemerintah kepada masyarakat yang sebagai pemangku kebijakan daerah dalam perencanaan ekowisata berbasis masyarakat yang dilakukan di Desa Mayangan dan

Desa Pilang. Kuisisoner diberikan kepada beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan dengan penelitian perencanaan kawasan ekowisata yakni BAPPEDA Kota Probolinggo, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kelurahan Pilang, dan Kelurahan Mayangan dengan jumlah 6 responden.

Persepsi Pemerintah tentang keberadaan hutan mangrove di desa Mayangan dan desa Pilang menunjukkan 66,7 % berpendapat sangat setuju dan 33,3 % berpendapat setuju, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tentang pengetahuan hutan mangrove sangatlah baik dan paham akan keberadaan hutan mangrove pada kedua objek desa tersebut. Selanjutnya yakni pendapat pemerintah tentang pentingnya kawasan hutan mangrove yang berada di Desa Mayangan dan Desa Pilang menunjukkan 100 % sangat penting, hal ini menunjukkan pemerintah sangatlah paham tentang peran hutan mangrove untuk kedua desa tersebut, hal ini ditunjukkan juga pada Perda Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 yang tertuang pada pasal 17 ayat 2. Pada persepsi pemerintah yang selanjutnya yakni tentang kondisi mangrove yang berada pada desa Mayangan dan Desa Pilang menunjukkan 16,7 % sangat terjaga dan 83,3 % terjaga.

Tabel 14. Persepsi Pemerintah tentang Keberadaan Hutan Mangrove

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Pendapat tentang keberadaan hutan mangrove yang berada di Desa Mayangan dan Desa Pilang	Sangat Setuju	4	66,7
		Setuju	2	33,3
		Tidak Setuju	0	0
		Sangat Tidak Setuju	0	0
2	Pendapat tentang pentingnya kawasan hutan mangrove yang berada di Desa Mayangan dan Desa Pilang	Sangat Penting	6	100
		Tidak terlalu penting	0	0
		Biasa Saja	0	0
		Tidak Penting	0	0
3	Pendapat pengetahuan kondisi mangrove di Desa Mayangan dan Desa Pilang	Sangat Terjaga	1	16,7
		Terjaga	5	88,3
		Tidak terjaga	0	0
		Sangat tidak terjaga	0	0
4	Pengetahuan tentang Ekowisata	Taman Nasional	1	16,7
4	Pengetahuan tentang Ekowisata	Wisata Alam	5	83,3
		Wisata Laut	0	0
		Wisata Hutan Raya	0	0
		Lainnya	0	0
5	Pendapat Jika Pesisir pantai area hutan mangrove dikembangkan untuk wisata berbasis masyarakat	Sangat Setuju	3	50
		Setuju	3	50
		Tidak Setuju	0	0
		Sangat Tidak Setuju	0	0

Sumber : Olah Data, 2017

Tingkat pengetahuan pemerintah tentang mangrove sangat lah penting untuk menjaga keberlangsungan hutan mangrove yang berada pada kedua objek desa

tersebut maupun Kota Probolinggo, pemerintah yang bertugas sebagai pemangku kebijakan, penggerak dan pengawas dalam menangani keberlangsungan hutan mangrove dari kerusakan yang nantinya akan mengurangi jumlah komoditi mangrove yang ada di Kota Probolinggo. Persepsi pemerintah tentang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di pesisir desa Mayangan dan Desa Pilang menunjukkan 50 % sangat setuju dan 50 % setuju untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata berbasis masyarakat, hal ini juga ditunjukkan dalam RTRW Kota Probolinggo 2009 – 2028 pada pasal 17 (a) ayat 6 dan pasal 43 ayat 2. Selanjutnya yakni persepsi pemerintah tentang partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 21.

Pada tabel 21. menunjukkan pendapat pemerintah tentang peran masyarakat, sarana dan prasarana diatas menunjukkan pendapat pemerintah tentang peran masyarakat pada pengembangan kawasan ekowisata mangrove, 100 % menunjukkan masyarakat sangat mendukung dan ingin berpartisipasi, hal ini pemerintah sangat yakin terhadap masyarakat akan mendukung dan dapat berpartisipasi dalam pengelolaanya, dan hal ini akan saling menumbuhkan saling kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sangat yakin akan peran masyarakat yang menjadi point penting dalam pelaksanaan dilapangan, karena masyarakat yang tahu persis lingkungan kawasan yang akan dikembangkan.



Tabel 15. Persepsi pemerintah tentang partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Partisipasi Masyarakat mengenai pengembangan ekowisata mangrove	Sangat mendukung dan ingin berpartisipasi dalam pengelolaanya	6	100
		Mendukung dan tidak ikut serta dalam pengelolaanya		
		Tidak mendukung dengan adanya wisata berbasis masyarakat di kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	0	0
		Masyarakat acuh tak acuh dengan adanya wisata berbasis masyarakat di kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	0	0
2	Fasilitas seperti apa yang harus disediakan di kawasan pesisir pantai area hutan mangrove guna mendukung wisata berbasis masyarakat	Tempat Penginapan	3	50
		Tempat Parkir	3	50
		Tempat Ibadah	4	66,7
		Tempat perdagangan (warung)	3	50
		Tempat untuk menerima pengunjung datang saat memberikan pengarahan	3	50
3	Fasilitas umum yang diberikan di kawasan pesisir pantai area hutan mangrove	Pembukaan jalur utama menuju pesisir pantai area hutan mangrove	2	33,3
		Pembukaan jalur untuk kendaraan bermotor	0	0
		Pembukaan jalur alternatif menuju	1	16,7
		Perbaikan akses jalan masuk menuju pesisir area mangrove dan hutan mangrove	3	50

Sumber : Olah Data, 2017

Selanjutnya pendapat pemerintah tentang fasilitas apa saja yang digunakan untuk mendukung kawasan wisata pesisir pantai area hutan mangrove, menunjukkan 50 % untuk adanya pengadaan tempat penginapan serta tempat parkir, 66,7 % menginginkan adanya tempat ibadah, dan 50 % menunjukkan pengadaan tempat perdagangan serta tempat pengarahan wisatawan atau biro informasi. Pada dasarnya atau hal terpenting yakni menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata tersebut, hal ini perlu ditekankan kepada pengembang (*stakeholders*) dan pemerintah yang bertugas sebagai pengawas terhadap kawasan wisata tersebut agar wisata tersebut berkembang dan berkelanjutan kedepannya. Fasilitas umum juga menjadi perhatian untuk menunjang kawasan tersebut untuk dapat diakses. Pendapat pemerintah tentang hal ini menunjukkan 33,3 % tentang pembukaan jalur utama menuju area hutan mangrove, 16,7 % tentang pembukaan jalur alternative menuju area hutan mangrove, dan 50 % perbaikan akses jalan masuk menuju area hutan mangrove. Dalam hal ini pemerintah memfokuskan adanya perbaikan jalan yang sudah ada, karena akses jalan yang memadai sangatlah diperlukan hal ini akan menjadi penilaian wisatawan tentang kepuasan akan kawasan wisata tersebut, terutama akses jalan yang akan dilalui nantinya, tidak terlepas dari faktor yang lain seperti prasarana penunjang kawasan wisata tersebut, seperti tempat ibadah, warung, tempat beristirahat, dan lain-lain.

Tabel 16. Persepsi pemerintah tentang potensi unggulan dan potensi yang diinginkan pemerintah

No	Komponen	Pendapat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Tujuan wisatawan berkunjung ke wisata ekowisata mangrove	Sekedar rekreasi ingin belajar / mengetahui tentang tanaman mangrove	2	33,3
		Hanya sekedar datang dan menikmati suasana	2	33,3
		Ingin berpartisipasi menanam mangrove untuk menjaga kawasan pesisir pantai	2	33,3
2	Potensi yang diunggulkan di kawasan ekowisata mangrove	Target Pengunjung	0	0
		Keberagaman jenis mangrove	1	16,7
		Sumber Daya Alam / Potensi	5	83,3
		Wisata pesisir	0	0
3	Upaya pemerintah mendorong kawasan mangrove untuk wisata berbasis masyarakat	Memberikan pelatihan pengelolaan pesisir pantai area hutan mangrove sebagai kawasan konservasi mangrove	1	16,7
		Ikut mengawasi kawasan pesisir pantai area hutan mangrove sebagai kawasan konservasi mangrove	0	0
		Ikut serta dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai area hutan mangrove sebagai kawasan konservasi mangrove	5	83,3
		Memberikan bantuan materi	0	0

Sumber : Olah Data, 2017.

Selanjutnya yakni adalah persepsi pemerintah tentang potensi unggulan dan potensi yang diinginkan pemerintah menunjukkan pada tabel 23. tujuan wisatawan untuk mengunjungi wisata mangrove masing – masing menunjukkan 33,3 % yakni

pada point sedekar rekreasi ingin belajar, hanya sekedar datang dan menikmati serta ingin berpartisipasi menanam mangrove. Sementara persepsi pemerintah tentang potensi yang diunggulkan pemerintah lebih menfokuskan kepada potensi Sumber Daya Alam 88,3 % dan keberagaman jenis mangrove 16,7 %, hal ini pemerintah menginginkan adanya masyarakat ingin memperdayakan sumber daya alam yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi suatu yang bermanfaat terutama bagi masyarakat sekitar dan hal ini akan berdampak pada keberagaman jenis mangrove yang akan semakin banyak pula. Selanjutnya pendapat pemerintah untuk mendorong kawasan mangrove untuk wisata yakni dengan ikut serta dalam pengelolaan kawasan pesisir area hutan sebagai kawasan konservasi mangrove sebanyak 83,3 % dan memberikan pelatihan pengelolaan pesisir area hutan mangrove sebagai kawasan konservasi mangrove. Hal ditemui dilapangan yakni program penanaman 56.000 bibit mangrove di Desa Pilang oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo dan Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan pada Tahun 2016



Gambar. 5 Program Penanaman Bibit Mangrove di Desa Pilang oleh Pemerintah

## **f. Konsep Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat**

### **1) Pembentukan Kelompok/organisasi desa**

Kegiatan wisata saat ini telah menjadi kebutuhan primer, yang dalam implementasinya kembali disesuaikan dengan kekuatan ekonomi masing-masing. Di Indonesia isu wisata bahari dalam kurun waktu 5 tahun ini meningkat seiring dengan meningkatnya isu terumbu karang dan potensi laut lainnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan. Hal ini dikhawatirkan akan melebihi daya dukung lingkungan. Dengan meningkatnya wisatawan maka jumlah sampah juga akan semakin meningkat dan jumlah air semakin terbatas. Selain itu, penambangan pasir dan terumbu untuk pembangunan penginapan juga terjadi. Sehingga dengan demikian, sebuah rencana menjadikan suatu kawasan wisata menjadi Ekowisata Bahari harus terprogram. Ekowisata berbasis masyarakat melibatkan penataan konsep bukan perihal dari kawasan saja, namun penataan dan perencanaan masyarakat yang merupakan titik penting dalam perencanaan ekowisata berbasis masyarakat. Murphy dalam Sunaryo (2013: 139) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

- a) Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
- b) Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
- c) Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Sebagai sebuah percontohan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat adalah ekowisata bahari di Indonesia. Menurut *Muh.Ruslan Afandy, (2013)* secara keseluruhan program ekowisata bahari melewati empat tahap program yakni:

- a. Perencanaan dan pembentukan kelompok.

Formulasi penentuan ekowisata bahari berbasis masyarakat dan pembentukan kelompok dirumuskan pada tahap ini melalui lokakarya dan diskusi.

- b. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Pada tahap ini ekowisata bahari diperkenalkan kepada pelaku-pelaku usaha terkait wisata, yaitu pemilik penginapan, penyedia jasa *catering*, penyedia kapal dan para pemandu lainnya melalui sosialisasi dan pelatihan. Selain itu pada tahap ini juga diupayakan adanya dukungan pemerintah untuk keberlanjutan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat di objek wisata dimaksud.

c. Penguatan kapasitas anggota kelompok.

Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas terkait kegiatan ekowisata untuk anggota kelompok diberikan.

d. Pengembangan kemandirian organisasi.

Pada tahap ini kemandirian organisasi dikembangkan dan diperkuat melalui serangkaian pelatihan organisasi, sosialisasi kelompok kepada pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, mempromosikan kelompok kepada pasar, serta meningkatkan peran organisasi dalam pengelolaan objek wisata, (Budi Santoso dkk, 2010).

Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci: pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata.

## 2) **Identifikasi Potensi Kawasan**

Kawasan hutan Mangrove di desa Pilang dan desa Mayangan merupakan salah satu ekosistem hutan mangrove yang berada di kawasan Kota Probolinggo, selain itu ada beberapa kawasan hutan mangrove yang berada di bagian utara Kota Probolinggo yakni berada pada Desa/Kelurahan Wiroborang, Sukabumi, dan Tisnonegaran yang merupakan deretan mangrove yang menyambung mulai dari Timur ke Barat. Kawasan mangrove di Desa Pilang memiliki potensi yang dibedakan menjadi 2 yakni potensi SDA dan Sosial-Budaya untuk potensi SDA mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh BPPT *Engineering* (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ) yang meliputi kesesuaian lingkungan, kadar

kesesuaian tanah, pH, tukar kation, dll. Selanjutnya potensi Sosial-Budaya yakni di kawasan desa Pilang sejak awal sudah berdiri UKM ( Usaha Kecil Menengah ) yang mengelola hasil mangrove yakni buah mangrove yang dijadikan tepung mangrove untuk dijadikan bahan makanan seperti kue dan harga untuk satu (1) kg tepung sebesar Rp.50.000 dan adanya pembibitan mangrove yang dilakukan mandiri oleh masyarakat setempat, dengan penjualan tingkat Nasional ke Pulau Madura, Bali, Banyuwangi, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya dengan harga Rp.1.500/ bibit dan masih banyaknya atau mayoritas masih menjadi lahan tak terbangun. Pada kawasan mangrove di Desa Mayangan merupakan kawasan yang berdampingan dengan kawasan industri di Kota Probolinggo, seperti industri yang paling besar yakni industri kayu yang dimiliki oleh negara Jepang dan adanya perkampungan nelayan yang menjual beberapa hasil lautnya di kawasan tersebut.

**g. Konsep Penataan Ruang Pesisir dan Hutan Mangrove Kota Probolinggo**

Kota Probolinggo merupakan yang notabene kawasaannya berbatasan langsung dengan kawasan pesisir. Pesisir membentang mulai dari sebelah timur – barat Kota Probolinggo ditumbuhi oleh vegetasi mangrove dan biota-biota didalamnya. Pesisir pantai timur salah satu pesisir pantai dengan potensi hutan mangrove untuk dikembangkan wisata berbasis ekowisata, termasuk kawasan pesisir Desa Pilang dan Desa Mayangan. Atas dasar tersebut maka hal ini mendukung terwujudnya suatu perencanaan guna memperbaiki kawasan, yaitu mereduksi abrasi dan alihfungsi hutan mangrove di pesisir pantai Desa Pilang dan Desa Mayangan agar kawasan tetap menjadi kawasan *green belt* pesisir pantai Desa



Pilang dan Desa Mayangan yang selanjutnya dapat menjadi potensi wisata daerah yang berkelanjutan. Rencana pengembangan kawasan ekowisata konservasi mangrove di Kota Probolinggo yang merujuk pada Perpres No.73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) dibuat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan penulis dalam mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RTRW, pengembangan kawasan wisata dan mangrove di Kota Probolinggo dilaksanakan di beberapa Desa/Kelurahan di Kota Probolinggo yang direncanakan hingga tahun 2028 salah satunya yakni Desa Pilang. Namun, dapat disadari bahwa Desa Mayangan tidak tercantum pada Desa yang masuk dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata dan mangrove di Kota Probolinggo, dikarenakan Desa Mayangan yang memang berbatasan langsung sebelah barat dengan kawasan Pelabuhan dan industri dikonsentrasikan sebagai kawasan pelabuhan, berdasarkan rencana pengembangan pelabuhan 2020-2030 Kementrian Perhubungan, wilayah pesisir di sebelah barat pelabuhan akan diarahkan untuk reklamasi guna menunjang kegiatan pelabuhan dan tercantum pada Perda Kota Probolinggo No.10 Tahun 2008 tentang RTRW Kota Probolinggo pasal 10 dan pasal 28 ayat (2).

#### **h. Zonasi Kawasan Pesisir Desa Pilang dan Desa Mayangan**

Berdasarkan PP No.6 Tahun 2007 pasal 1, Kawasan Konservasi Perairan (KPP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi. Pengertian zonasi atau *zoning* adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi

pengembangan fungsi-fungsi lain. Zonasi yang dilakukan harus berpedoman yang baik agar zonasi yang dilakukan dapat menyinkronkan kawasan wisata, ekosistem mangrove (ekologi) dan budaya masyarakat sekitar. Pengembangannya dilakukan berdasarkan potensi hutan mangrove yang dimiliki dan peruntukan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga fungsi pariwisata sejalan dengan fungsi konservasi. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pembagian zona-zona pesisir pantai seperti zona konservasi, zona pemanfaatan (kawasan budidaya) dan zona pengembangan. Di Desa Pilang dan Desa Mayangan memiliki potensi, yakni pada Desa Pilang dengan melihat potensi yang ada yakni membagi dalam 2 (dua) zonasi kawasan yakni kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi. Pada Desa Mayangan dengan melihat potensi yang ada jua, yakni membagi dalam 2 (dua) zonasi kawasan yakni pemanfaatan umum dan kawasan konservasi. Zonasi kawasan pesisir Desa Pilang dan Desa Mayangan dibuat berdasarkan hasil analisis spasial dengan memanfaatkan sistem informasi geografi (SIG) dari *google earth*. *Google earth* juga digunakan sebagai dasar pemetaan kawasan sesuai dengan hasil observasi lapangan.

#### 1. Zona Inti atau Pemanfaatan Umum

Merujuk pada Kep.34/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pualu-Pulai Kecil, Zona Pemanfaatan Umum adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum. Zona ini meliputi yakni objek utama yakni pemandangan laut lepas dan

hutan mangrove. Langkah awal yakni dengan membuat jalur – jalur tracking untuk memudahkan wisatawan menikmati suasana hutan mangrove dan pemandangan laut, pembuatan spot – spot untuk berfoto yang mengambil laut dan hutan mangrove sebagai latar belakang foto atau disebut *background*. Selanjutnya, pembuatan sarana dan prasarana yakni pondok – pondok untuk istirahat wisatawan, tempat duduk, dan panggung rakyat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang kawasan tersebut akan membuat wisatawan yang merupakan pembeli daya tarik tersebut akan merasa puas dengan sarana prasarana yang mendukung, dan memberikan kesan nyaman wisatawan terhadap kawasan wisata tersebut.

## 2. Zona Konservasi

Zona konservasi yakni zona yang diperuntukkan sebagai kawasan yang digunakan untuk pembibitan mangrove yang berada pada kawasan wisata tersebut. Pada kawasan ini terdapat peraturan ketat untuk pelanggaran terhadap kawasan mangrove tersebut. Hal ini dikarenakan guna melindungi, kawasan ini juga meliputi kawasan yang menjadi tempat fauna dan flora yang berada pada kawasan tersebut. Berdasarkan RTRW Kota Probolinggo tahun 2010 pada pasal 17 tentang Kebijakan dan Strategi Penetapan Fungsi Kawasan Pesisir menyebutkan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, dengan strategi sebagai berikut : menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem pesisir dan menjaga fungsi tumbuhan pantai/mangrove, terumbu karang dan ekosistem pantai secara lestari dan alami. Hal ini dimaksudkan masyarakat agar tidak melakukan kerusakan pada kawasan pesisir khususnya kawasan mangrove yang berada pada kawasan yang telah

ditetapkan dengan pengawasan pemerintah sebagai pengawas kegiatan pada kawasan tersebut.

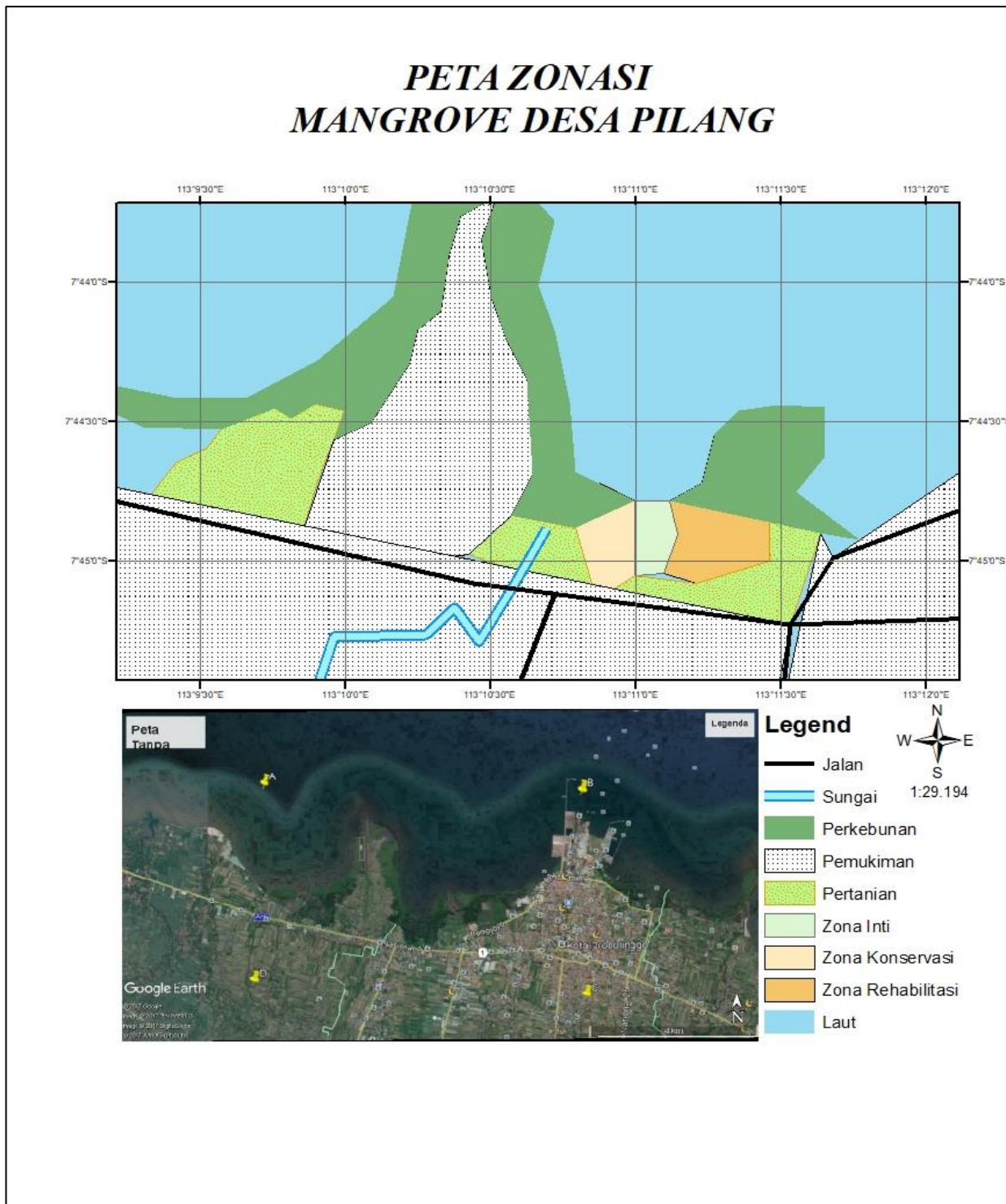
### 3. Zona Rehabilitasi

Kawasan Rehabilitasi yakni kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan yang difokuskan untuk kawasan perbaikan khususnya kawasan mangrove yang sudah mengalami kerusakan parah lingkungan maupun alam. Yakni dengan pembentukan kelompok pecinta alam di Desa Pilang dan Desa Mayangan dengan kerjasama dari pemerintah yakni Dinas Pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, dan Dinas Kehutan Jawa Timur. Kegiatan rehabilitasi ini diharapkan dapat mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Kawasan ini juga bisa digunakan sebagai kawasan edukasi bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat kawasan wisata.

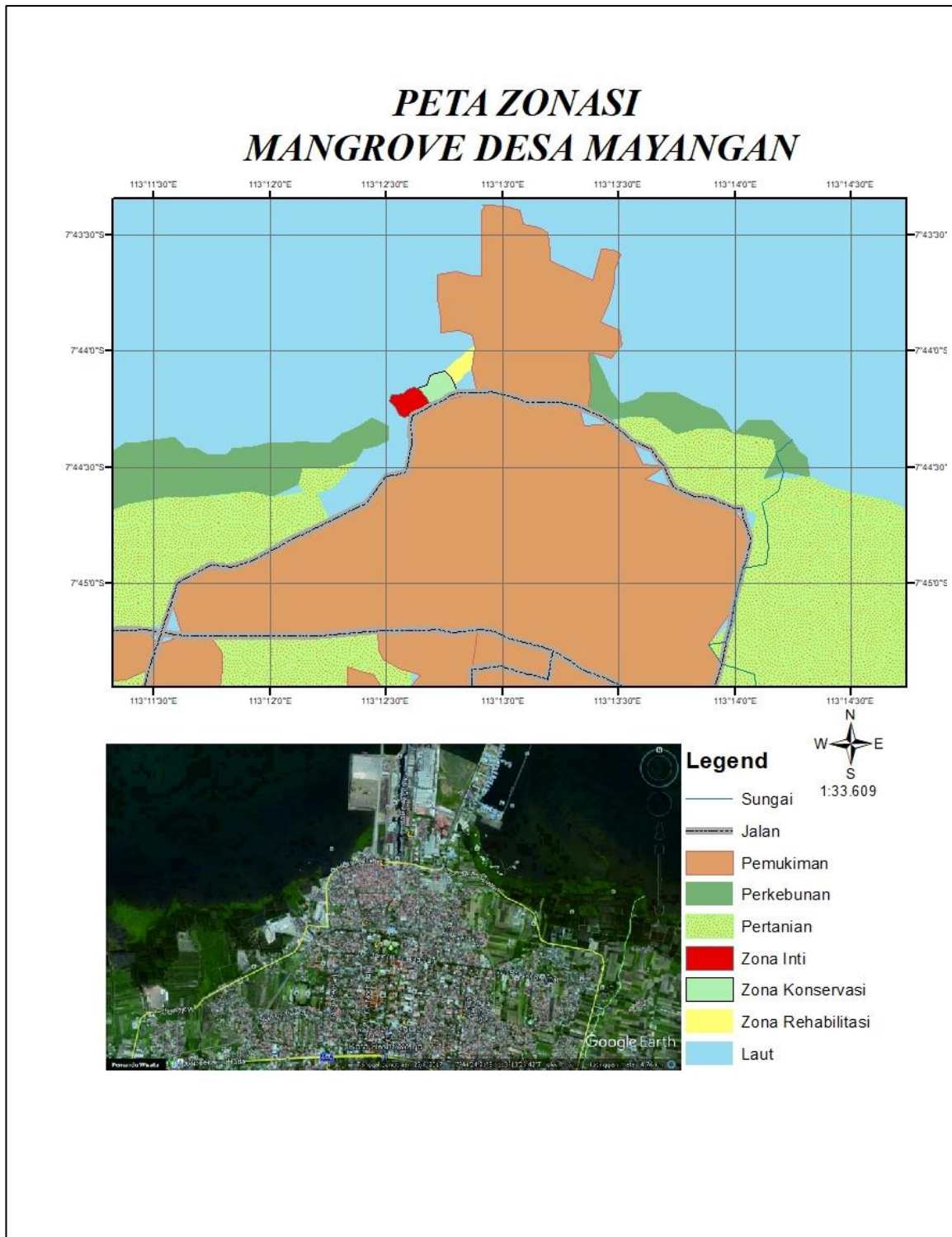
### 4. Zona Pendukung Wisata

Zona Kawasan Pendukung Wisata yakni kawasan yang diperuntukkan sebagai fasilitas yang menunjang adanya kawasan wisata tersebut seperti, rumah makan, toilet, tempat parkir dan kawasan oleh – oleh khas daerah tersebut. Kawasan ini bisa terletak berdekatan dengan akses jalan dan prasarana yang telah ada. Kawasan nantinya akan berada pada kawasan TPI ( Tempat Pelelangan Ikan ) yang terbengkalai dan berada area parkir wisatawan . Zona Kawasan Pendukung Wisata ini meliputi yakni adanya rumah makan yang di kelola oleh masyarakat setempat dan sekaligus sebagai tempat istirahat wisatawan, tempat oleh – oleh yang juga dikelola oleh masyarakat sekitar yakni usaha yang telah dirintis oleh masyarakat

sekitar yakni oleh – oleh berupa tepung mangrove, kerupuk ikan, dan souvenir kawasan wisata tersebut. Hal ini akan menimbulkan kesan wisatawan terhadap kawasan tersebut dan memunculkan potensi khas yang berada pada kawasan wisata tersebut.



Gambar. 6 Peta Zonasi Kawasan Mangrove di Desa Pilang



Gambar. 7 Peta Zonasi Kawasan Mangrove di Desa Mayangan

### **i. Perencanaan Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Mayangan dan Desa Pilang**

Dalam perencanaan Kawasan Ekowisata Mangrove yang berada pada dua Desa / Kelurahan yakni Desa Pilang dan Desa Mayangan harus yang ditonjolkan yakni aspek-aspek pembangunan wisata yang berkelanjutan. Keduanya mempunyai kerentanan adanya abrasi daratan laut dan pendegradasian ekosistem laut yakni pencemaran yang diangkut oleh berbagai sungai maupun akibat perusakan lingkungan, terutama kerusakan kawasan mangrove itu sendiri. Tata guna dan pemanfaatan lahan merupakan salah satu upaya guna menanggulangi permasalahan tersebut. Penataan ruang pesisir didasari oleh ekosistem, ekologi dan eksisting kawasan pesisir pantai yang akan dikembangkan, Desain pengembangan dan penataan kawasan mangrove Desa Mayangan dan Desa Pilang sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat.

#### **1. Pemilihan Jenis Tanaman**

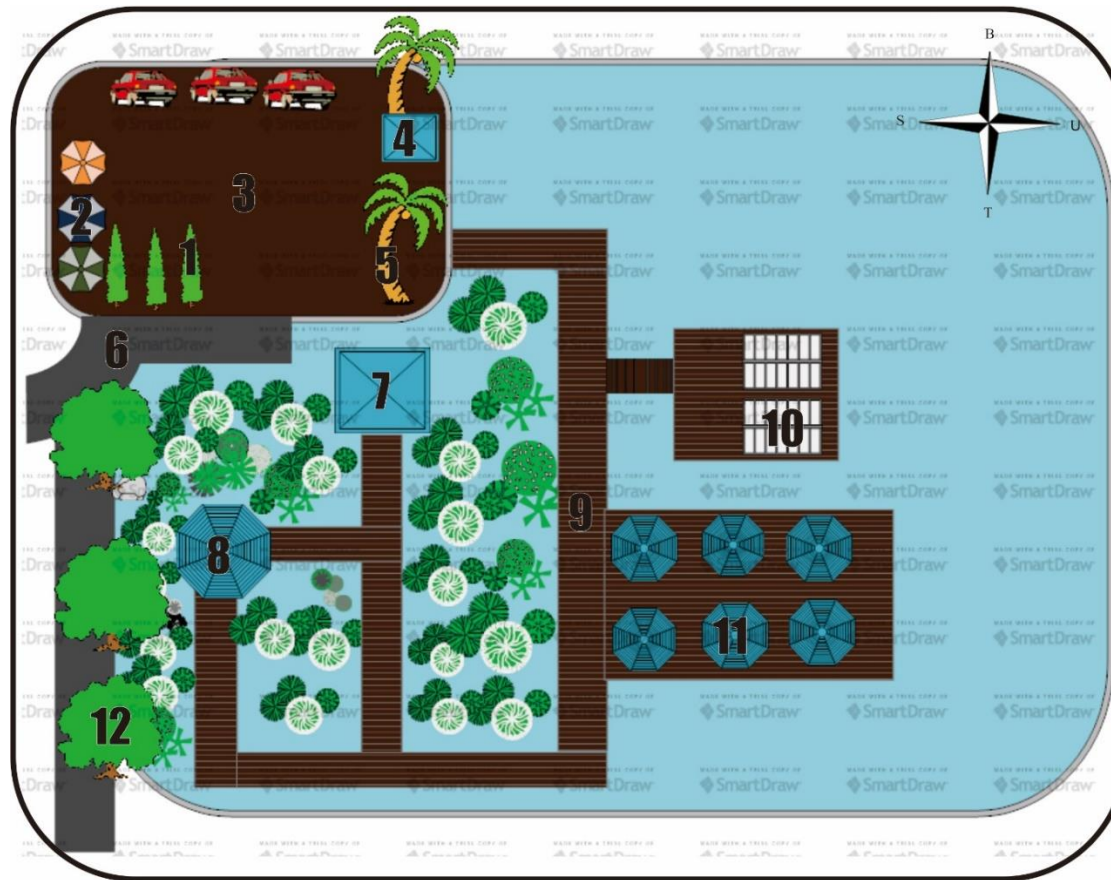
Pemilihan jenis tanaman di kawasan ekowisata ditujukan untuk menambah keadaan kawasan atau kondisi eksisting penunjang estetika kawasan dan keberagaman jenis mangrove di kawasan ekowisata tersebut. Pemilihan jenis tanaman yakni meliputi jenis tanaman yang memberikan eksotika kawasan yakni seperti pohon kelapa yang berfungsi sebagai pemecah angin yang ditempatkan di bagian depan kawasan, pohon angsa (*Pterocarpus indicus*), ketapang (*Terminalia catappa*) dan pohon lamtoro atau petai cina (*Leucaena leucocphala*) yang berfungsi sebagai peneduh di daerah tempat parkir, tempat bersantai, warung-warung makan, dll. Selanjutnya yakni pemilihan jenis tanaman mangrove sesuai dengan zonasi mangrove. Berdasarkan Bengen (2001), jenis – jenis mangrove pohon penyusun hutan mangrove umumnya mangrove di Indonesia jika



dirunut dari arah laut ke arah daratan biasanya dapat dibedakan menjadi 4 zonasi yaitu Zona api -api (*Avicennia – Sonneratia*), Zona Bakau (*Rhizophora spp*), Zona Tanjung (*Bruguiera*), dan Zona Nypah (*N Fructicans*).

## 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata

Sarana dan prasarana yang dibuat yakni adanya pengadaan kamar kecil atau toilet, warung – warung makan yang dikelola oleh masyarakat sekitar untuk wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata, dan rumah ibadah. Pengadaan *tracking* atau jalur untuk berjalan – jalan wisatawan didalam hutan mangrove, panggung rakyat sebagai tempat berfoto atau berswafoto dengan background langsung laut sekaligus sebagai tempat hiburan bagi wisatawan yang berkunjung, dan gubuk – gubuk santai di dalam hutan mangrove sebagai tempat bersantai menikmati hutan mangrove. Pusat informasi dan loket berada di depan kawasan pintu masuk ke dalam hutan mangrove, dan greenhouse penanaman bibit hutan mangrove yang berada dekat setelah pintu keluar dari wahana hutan mangrove, greenhouse sebagai tempat pembibitan hutan mangrove dan wisatawan dapat melihat pembibitan hutan mangrove dan belajar langsung jika ingin belajar yang langsung dipandu oleh masyarakat setempat.



## Keterangan

1. Tanaman Glodogan Pecut
2. Warung / Tempat oleh-oleh
3. Lahan Parkir
4. Pusat Informasi / Pintu Masuk
5. Pohon Kelapa
6. Jalan Raya
7. Musholla / Toilet
8. Tempat Istirahat
9. Jalur Tracking
10. Green House Pembibitan
11. Tempat Istirahat
12. Pohon Angsana



<http://parapejalan.id/category/explore-indonesia/jakarta/>



<http://bhjodha.blogspot.co.id/2015/04/wana-wisata-pantai-bentar-probolinggo.html>

Gambar. 8 Desain Kawasan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Mayangan



### Keterangan

1. Tanaman Angsana
2. Pohon Ketapang
3. Musholla / Toilet
4. Warung Makan / Oleh-oleh
5. Tanaman Glodogan Pecut
6. Tempat Informasi / Pintu Masuk
7. Pohon Kelapa
8. Green House Pembibitan Mangrove
9. Tempat Istirahat
10. Musholla / Toilet
11. Pangung / Spot Foto



Gambar. 9 Desain Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Pilang

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Potensi yang ada pada objek desa yang digunakan untuk penelitian yakni desa Mayangan dan desa Pilang meliputi Sumber Daya Alam seperti hutan mangrove, yang berada pada kawasan, dan sosial budaya dan ekonomi yang dikembangkan meliputi tradisi petik laut yang tiap tahun dilakukan di Kota Probolinggo dan ekonomi UKM yang telah dikembangkan di kawasan.
2. Konsep pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat seperti komunitas peduli pesisir di kedua objek desa atau sejenisnya yang bertujuan untuk memenejemen kawasan ekowisata, pemilihan tanaman dan pola tanaman, dan pengadaan sarana prasarana pendukung kawasan

### **B. Saran**

1. Perlu segera dilakukan pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana penunjang wisatawan.
2. Perlu dilakukan musyawarah antara masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi selisih karena, kawasan kepemilikannya masih tumpah – tindih dengan pemilik pemancingan – pemancingan di sekitar kawasan.